

TRAGEDI 11 SEPTEMBER DAN PERJUANGAN MUSLIM DEMOKRAT*



Robert W. Hefner
Program Studi Antropologi,
Universitas Boston

E nam ratus tahun yang lalu, sejarawan besar Arab, Ibn Khaldun, dalam penelitiannya menemukan bahwa agama rakyat (*popular religion*) dalam masyarakat Muslim cenderung terombang-ambing antara periode ketaatan beragama yang ketat dan periode ketaatan beragama yang lemah. Pengamat sosial yang tajam ini, Khaldun, mengaitkan siklus kultural dengan gambaran ekologi dan organisasi sosial yang

khas Timur Tengah. Ia mencatat bahwa pemukiman urban di seluruh wilayah ini berada di tengah padang rumput dan padang pasir yang didiami oleh kaum badui (nomaden) dan menurut perkiraan hanya dikontrol oleh aturan-aturan yang berbasis kota. Pada prinsipnya, kaum badui juga menganut keyakinan warga kota. Karena tergiur akan kesenangan kehidupan kosmopolitan, penduduk kota cenderung tidak menjaga moral mereka dan terperosok ke dalam apa yang, meminjam perspektif kaum fanatik, kemerosotan menuju kedzaliman. Karena telah kebal oleh tuntutan keras akan kehidupan gurun pasir, penduduk badui lebih resisten terhadap keterpurukan moral semacam ini. Akibatnya, kaum badui mempunyai potensi besar untuk menjadi tentara cadangan ketika kaum pembaharu Islam muncul, mengutuk dekadensi moral kaum urban dan menuntut untuk kembali pada Teks Suci secara puritan. Menurut Khaldun, di mana kaum pembaharu dapat menyentak kemarahan kaum badui, pembaharu bisa sukses menekan penduduk urban ke dalam kesalehan skriptural untuk satu atau dua generasi. Namun, pada akhirnya, godaan

* Diterjemahkan dari artikel "September 11 and the Struggle for Islam" yang dimuat dalam *Social Science Research Council On Line* oleh Wahyuni Widyaningsih.

urban memikat warga kota untuk kembali ke jalan mereka semula, menciptakan kondisi seperti siklus lain yang terjadi sebelum munculnya gerakan pembaruan agama.

Teori Khaldun ini tidak pernah benar-benar bisa diaplikasikan di seluruh dunia Muslim atau di sepanjang sejarah Islam. Kerajaan-kerajaan besar Islam di Mesopotamia, Turki, Spanyol Islam, dan Asia Tenggara, pada umumnya tidak terdapat kaum badui, namun mereka juga mengalami periode pembaruan keagamaan. Namun demikian teori ini memberi pemahaman kepada kita sejauh mana model Khaldunian ini terbukti benar hingga saat ini. Inti pesannya bukan terletak pada seberapa mendetail penggambaran kehidupan padang pasir, tetapi pada pengakuannya bahwa reformasi dan kontestasi agama telah lama menjadi potret masyarakat Muslim. Hal lain yang sama-sama penting, Khaldun mengingatkan kita bahwa, dalam era modern sebagaimana pada masa klasik, gerakan-gerakan reformasi Islam seringkali melibatkan upaya-upaya para pemimpin agama untuk mengaitkan ambisi agama dengan beberapa kelas sosial yang lemah dan dirugikan. Ketika keterkaitan semacam itu tercipta, gerakan reformasi Islam bisa memperluas horisonnya melampaui tujuan mempertinggi kesalehan menjadi tujuan untuk transformasi sosial dan politik.

Menunjuk langsung keberadaan gerakan ini di Amerika Serikat, serangan 11 September mendorong terjadinya badai spekulasi di media tentang sifat dasar dan skala ancama "Islam". Pada halaman

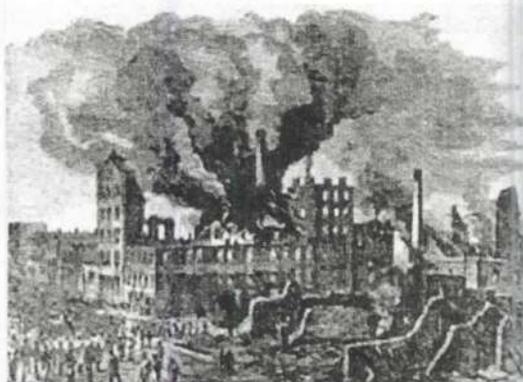
sampul *Newsweek* edisi 15 Oktober ada sebuah judul yang dicetak tebal yang secara gamblang menjelaskan soal ini: "Mengapa Mereka Membenci Kita: Akar-akar Kemarahan Islam dan Apa Yang Dapat Kita Lakukan." Sebagai akibat lanjutan dari sebuah tragedi sebesar serangan 11 September, refleksi Amerika-sentris tentang persoalan ini menjadi dapat dipahami dan menjadi penting artinya. Namun, akan memalukan jika fokus tentang ancaman terhadap kebebasan kita sendiri ini menggiring kita untuk mengabaikan fakta bahwa kekerasan tidak semata-mata ditujukan untuk melawan Amerika Serikat tetapi juga ditujukan terhadap kaum Muslim moderat dan pro-demokrasi di seluruh dunia. Serangan itu bukanlah babak terakhir dari pertarungan panjang antara Muslim moderat dan Islam garis keras demi memperebutkan hati dan pikiran para pemeluk Islam.

Sebagaimana pengamatan Khaldun, meskipun kompetisi antar berbagai pandangan tentang Islam yang saling bertentangan bukan hal baru, namun lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, pertarungan itu telah menemukan bentuk baru. Hingga akhir 1950-an, mayoritas besar Muslim masih terdiri dari orang-orang pinggiran. Setelah mencapai kemerdekaan, pemerintahan nasionalis meluncurkan program ambisius yaitu pendidikan massa. Hingga tahun 1970-an, mereka telah berhasil mengangkat angka melek huruf dan tingkat pendidikan beberapa kali lipat dari sebelumnya (Eickelman 1992). Program-program nation-building

menghasilkan pembangunan jalan, pasar, media massa, dan administrasi negara yang menangani langsung berbagai komunitas yang dikuasai sebelumnya. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, alat komunikasi dan media elektronik menarik Muslim untuk terlibat lebih jauh ke dalam "majelis global" yang baru [*the new "global ecumene"*] (Hannerz 1992). Melalui berbagai perubahan ini, masyarakat Muslim menjadi terbuka pada pengaruh luar (hingga taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya) dan dipaksa untuk menghadapi pertanyaan yang tak mengengakkan tentang bagaimana menghadapi perbedaan di era kita sekarang ini.

Semua perkembangan ini merupakan ancaman serius bagi para pemimpin Islam tradisional, yang otoritasnya menjadi dasar kesatuan yang utuh antara masyarakat dan agama. Namun di daerah kumuh yang padat seperti di Kairo, Kabul, atau Jakarta, dunia kecil tempat berlabuhnya keluarga, sanak famili dan garis keturunan, *imam* lokal tidak lagi berperan sebagai pedoman dan, atau teladan yang efektif bagi penduduk setempat. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan dan *nation-building*, sebagian anomie seperti itu dialami oleh para migran kota yang dinetralisir oleh seruan rakyat demi nasionalisme. Akan tetapi, korupsi, kebijakan yang salah, dan peruntungan nasib yang benar-benar buruk, berkait berkelindan untuk memastikan bahwa pemimpin nasionalis di beberapa negara Muslim gagal untuk memenuhi janji terwujudnya kemakmuran dan kemajuan.

Dalam kondisi yang tidak stabil seperti



ini, pada tahun 1970-an dan 1980-an, dunia Muslim menyaksikan kebangkitan agama dengan proporsi yang tidak ada preseden sebelumnya. Pada awal periode pasca perang, program *nation-building* telah berusaha memprivatisasi dan mendepolitisasi peran agama, mensubordinasikan kehidupan islami ke dalam ideologi sekular dan agen-agen negara. Berbagai aturan juga mencoba mematok batas-batas yang tegas mengenai aktivitas para penjaga pengetahuan agama, *ulama* (arti harfiahnya adalah "mereka yang tahu", yaitu para akademisi Islam yang dididik secara klasik), mereka membutuhkan ijin, misalnya, ketika para tokoh agama berceramah di depan publik. Namun hingga tahun 1960-an, penggabungan pendidikan umum dan penjualan besar-besaran buku-buku Islam murah (Atiyeh 1995) membuat literatur Islam bisa diakses oleh pembaca publik secara luas. Meskipun mereka tidak punya surat mandat dari para akademisi tradisional, kaum Muslim awam mulai percaya bahwa mereka juga mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan makna keyakinan agama mereka. Demokratisasi

otoritas beragama serupa telah terjadi – tentunya- dalam Protestan Amerika pada awal abad ke-20 (lihat Wuthnow 1988).

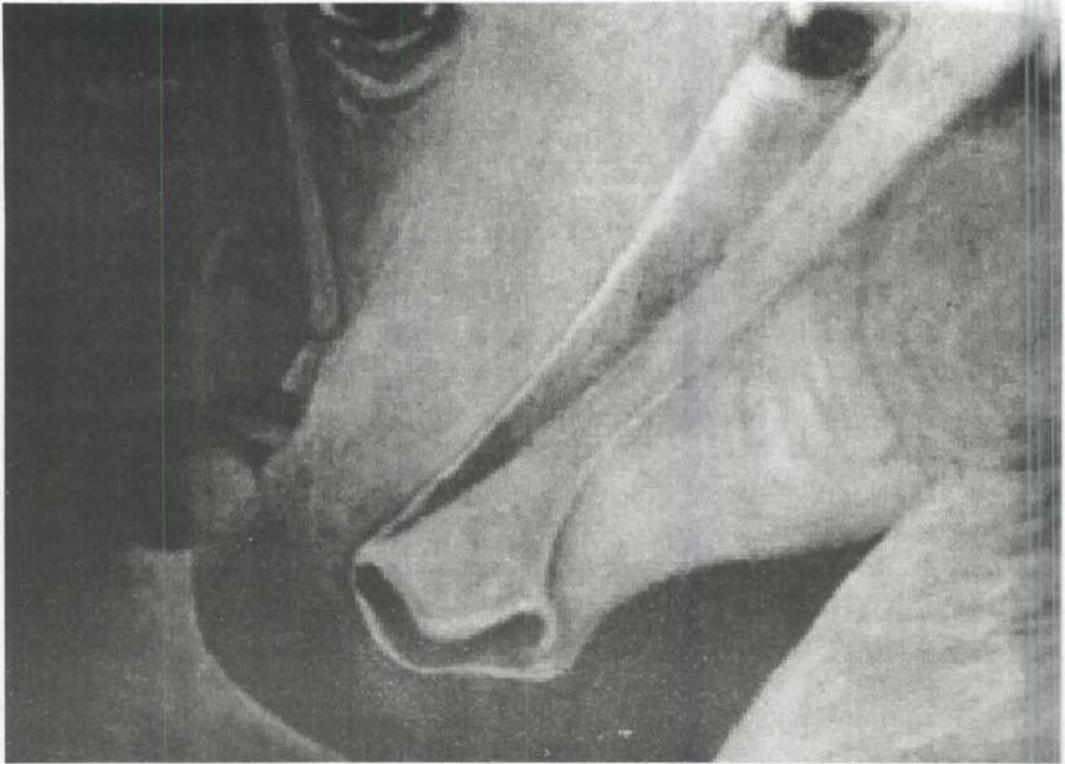
Melalui berbagai perkembangan semacam ini, kehidupan publik dalam masyarakat Muslim menyaksikan tumbuhnya “kompetisi dan persaingan dalam menafsirkan simbol [agama] dan juga kontrol terhadap institusi-institusi -baik formal maupun informal- yang menciptakan dan menopang tafsir-tafsir agama tersebut” (Eikleman dan Piscatori 1996: 5). Ulama tradisional mendapati peran mereka sebagai penafsir agama ditantang oleh sekelompok besar pemimpin Muslim lawan. Pemaknaan Islam itu sendiri menjadi fokus perdebatan publik yang sengit.

Berbeda dengan klaim-klaim kelompok Islam garis keras dan beberapa laporan media di Barat, dari dulu hingga kini tidak pernah ada watak politik yang seragam terhadap kebangkitan itu (Hefner 2000). Beberapa kelompok kebangkitan Islam bersikeras bahwa Islam tidak tahu-menahu soal demokrasi, hak asasi manusia, dan civil society. Karena diperburuk oleh konflik antara Israel dan Palesitna, nasib menyedihkan Muslim Bosnia, dan perkembangan internasional lainnya, beberapa pemimpin Muslim berbicara dalam rangka mengingatkan kepada para analis kebijakan Barat akan adanya “clash of civilizations” antara Barat dan Islam (lihat Fuller dan Lesser 1995; Halliday 1996; dan, pada clash of civilizations sendiri, Huntington 1996).

Akan tetapi, di kalangan para pemimpin baru Muslim ada sejumlah orang yang

melihat secara mendalam bahwa agamanya bersesuaian dengan gagasan demokrasi, kebebasan warganegara, aturan hukum, dan jalinan kerjasama dengan Barat (an-Na'im 1990; Esposito dan Voll 2001; Cooper, Nettler, dan Mahmoud 1998). Aliran ini dalam perpolitikan Muslim modern telah diberi sejumlah nama, antara lain; neo-modernisme, liberalisme Islam, atau, mudahnya, Islam demokratik. Titik tekan kekuatan dan ideologi yang tepat dari Islam demokratik sangat beragam dalam setting nasional yang berbeda. Akan tetapi, pada umumnya para demokrat Muslim memegang konsep pemerintahan konstitusional, perimbangan kekuasaan negara, kebebasan warganegara, dan adanya pemisahan antara otoritas agama dan negara. Kebebasan warganegara yang mereka tekankan mencakup tiga hal yang langsung bertentangan dengan pandangan Islam konservatif, yaitu: kebebasan dan kesetaraan dalam beragama, bukan pandangan yang menurunkan non-Muslim ke dalam status kelas kedua sebagai “minoritas yang dilindungi” (*dhimmi*); persamaan hak warganegara bagi perempuan dan laki-laki, bukan subordinasi hirarkis otoritas perempuan terhadap otoritas laki-laki; dan kebebasan Muslim untuk berbeda pendapat dengan opini agama yang sudah mapan, bukan pembuangan atau dihukum mati karena murtad (lihat, misalnya, an-Na'im 1990; Soroush 2000).

Sembari menolak gagasan negara “Islam”, kaum Muslim demokrat secara khusus tidak mendukung privatisasi



sepenuhnya terhadap agama yang bermakna mundurnya agama dari kehidupan publik dan dikucilkan ke dalam realitas yang benar-benar privat. Beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, ada sebuah artikel tentang agama dalam bingkai kebijakan Barat yang menyatakan bahwa modernisasi membutuhkan mundurnya agama dari kehidupan publik. Kini hampir semua ahli agama di Barat menyadari bahwa, pada kenyataannya, tradisi keberagamaan di negara-negara seperti Amerika Serikat senantiasa memainkan peran yang amat penting dalam kehidupan publik (lihat Casanova 1994; Wuthnow 1988). Pelajaran yang dapat ditarik dari semua itu adalah bahwa seseorang dapat menjadi taat beragama dan sekaligus demokratis pada saat yang

bersamaan. Kunci untuk bisa seperti itu adalah membuang ambisi untuk menggabungkan agama dan negara, dan mengkonsentrasikan energi beragama seseorang pada civil society dan ruang publik. Seperti halnya warganegara yang beragama di Barat, para Muslim demokrat bersikeras bahwa agama mereka kompatibel dan cocok dengan kebiasaan warganegara (*civic habits*) – jika dan hanya jika hal itu menguatkan komitmen publik pada kemerdekaan, kesetaraan, dan toleransi. Dengan memperkuat nilai-nilai demokratik, agama dapat membantu menyediakan sumber-sumber sosial yang dibutuhkan, yang dalam ungkapan Robert Putnam (1993) “untuk membuat demokrasi berjalan”.

Seperti halnya Yahudi, Islam adalah

agama yang menganut hukum [ciptaan] Tuhan [divine law] atau *syari'ah*. Setelah sekian lama berjalan, reformasi demokratik Islam membutuhkan para pekerja yang ulet dari kalangan intelektual dan ahli hukum Islam yang bersedia dan mampu mengusung tradisi mereka ke dalam dialog, tidak hanya sekedar berkutat dengan sumber-sumber hukum, tetapi juga harus terlibat dengan tuntutan dari dunia modern terkini (an-Na'im 1990). Kesuksesan jangka panjang dari upaya ini pada gilirannya akan tergantung, tidak hanya pada kekuatan argumen intelektual, tetapi juga tergantung pada perimbangan kekuatan antar kelompok Muslim yang bersaing dalam masyarakat maupun negara.

Ini adalah fakta terkini yang membuat arus kampanye militer Amerika Serikat di Afganistan penuh dengan peluang sekaligus bahaya. Gerakan Islam *Jihadi* sudah menggunakan kampanye militer AS tersebut untuk memobilisasi perlawanan terhadap rival moderat mereka. Meskipun kampanye militer Amerika Serikat di Afganistan terbukti sukses, tetapi pertempuran antara dua kubu masyarakat Muslim yang pandangan politiknya saling bertentangan ini akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.

Untuk jangka panjang, kesuksesan muslim demokrat memerlukan upaya Amerika Serikat dan negara-negara lain mendedikasikan diri mereka untuk mencari jalan keluar konflik Israel-Palestina. Selama kebuntuan itu masih tetap ada, seruan Muslim demokrat untuk perdamaian dan toleransi terhadap semua

peradaban akan mendapat sambutan yang dingin di lingkungan dunia Muslim. Hasil yang positif dari "perang melawan Islam" juga akan tergantung pada komitmen jangka panjang Barat pada program pendidikan dan ekonominya di dunia Muslim. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa mayoritas Muslim tersebut (muslim demokrat) memegang peranan dalam pemerintahan mereka, dan dalam tatanan politik global di mana mereka diperlakukan sebagai partner yang dihargai [secara layak].

Pertentangan peradaban [clash of civilizations] antara Islam dan Barat pada hakekatnya tidak ada. Pertarungan yang benar-benar menentukan justru terjadi *dalam* peradaban Islam, di mana kelompok ultrakonservatif bersaing melawan kelompok moderat dan demokrat demi memperebutkan jiwa masyarakat Muslim. Globalisasi yang begitu menyebar luas dalam abad kita tidak akan pernah mengakibatkan homogenisasi kultur dan identitas di seluruh dunia. Proses yang *telah* selesai adalah membuat semua kepentingan yang kita bagi bersama mayoritas besar Muslim menjadi lebih jelas. Orang berharap bahwa bangsa Amerika tidak akan pernah melupakan kenyataan ini sebagaimana kita terlalu sulit melewatkan peristiwa 11 September. Pelajaran yang perlu tetap kita camkan dalam benak kita adalah bahwa penderitaan, kekejaman serta kebiadaban yang kita rasakan juga dirasakan bersama oleh jutaan umat Islam. Kini mereka melihat kita hanya untuk mengingat seberapa dalam kita bersama merasakan tantangan

politik dan sebagai sesama umat manusia.

Daftar Pustaka

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Atiyeh, George N. 1995. *The Book in the Islamic World: The written Word and Communication in the Middle East*. Albany: State University of New York.
- Casanova, José. 1994. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cooper, John, Ronald Nettle, and Mohamed Mahmoud. 1998. *Islam and Modernity: Muslim Intellectuals Respond*. London: I.B. Tauris.
- Eickelman, Dale F. 1992. "Mass Higher Education and the Religious Imagination in Contemporary Arab Societies." *American Ethnologist* 19:4 (November): 1-13.
- and James Piscatori. 1996. *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Esposito, John. L. 1992. *The Islamic Threat: Myth or Reality*. New York: Oxford.
- , John L. and John O. Voll. 1996. *Islam and Democracy*. New York: Oxford.
- , 2001. *Makers of Contemporary Islam*. New York: Oxford.
- Fuller, Graham E. and Ian O. Lesser. 1995. *A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West*. Boulder: Westview.
- Halliday, Fred. 1995. *Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East*. London: I.B. Tauris.
- Hannerz, Ulf. 1992. *Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning*. New York: Columbia.
- Hefner, Robert W., 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Kepel, Gilles. 1984. *Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh*. Berkeley: University of California Press.
- . 1997. *Allah in the West: Islamic Movements in America and Europe*. Stanford: Stanford University Press.
- Khaldun, Ibn. 1958. *The Muqaddimah*. Translated by F. Rosenthal. 3 vols. New York: Pantheon.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Roy, Olivier. 1994. *The Failure of Political Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soroush, Abdolkarim. 2000. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Wuthnow, Robert. 1988. *The Restructuring of American Religion: Society and Faith Since World War II*. Princeton: Princeton University Press.